

REAKTUALISASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN ISLAM KE MASA DEPAN

Fakhruddin Azmi

Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Universitas Islam Negeri Sumatrerera Utara

Abstrak

Kata kmunci : reaktualisasi, kebijakan, pemberdayaan, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Sejak awal abad ke XVIII telah berlangsung pembaharuan bidang pemikiran dan juga pendidikan Islam. Upaya ini sebagai refleksi dari tokoh pemuka dan para ulama baik secara sendiri maupun bersama menyadari kelemahan, kejumudan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan Ummat Islam terhadap kemajuan Barat. Berbagai pihak sampai pada kesimpulan bahwa titik kelemahan ummat tersebut terletak pada tertutupnya pintu ijtihad. Usaha pertama justru adalah memecahkan dinding kaca tradisional yang tebal dan telah mapan membelenggu budaya masyarakat Islam sehingga menjadi anti intelektualis dan anti perubahan dan terikat pada otoritas keulamaan.

Gerakan pembaharuan itu menjuruskan perhatian pada dorongan untuk membuka pintu ijtihad, kembali kepada Nash dan Sunnah dan semangat untuk mengetahui sunnatullah. Upaya pembaharuan ini dipelopori oleh Sayid Ahmad Khan, Sayid Amir Ali (India), Jamaluddin Al Afghani, Nanik Kemal (Turki), Muhammad Abduh (Mesir) Pembaharuan ini mendapat respon yang luas dari berbagai kalangan ummat Islam. Kelompok pembaharu ini kemudian disebut dengan kelompok Modernis.

Sebelum mereka sudah ada juga usaha ke arah perbaikan seperti yang dilancarkan oleh Syekh Abdul Wahab, dikenal dengan gerakan Wahabiyah menitik beratkan pada upaya perbaikan aqidah dengan seruan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, menolak semua bentuk bid'ah khurafat yang tumbuh dalam kehidupan ummat. Gerakan ini disebut juga Puritanisme atau Purifikasi.

Hakikat gerakan ini ingin mengkostruksi spritualitas dan moralitas Islam atas dasar kemurnian awal Islam. Fazlur Rahman menyebut gerakan ini dengan rivivalisme atau fundamentalisme,¹

Gerakan pembaharuan awal ini (modernisme klasik) ini memandang perlunya persatuan universal ummat Islam (Pan Islamisme) dan berkesimpulan bahwa kemunduran ummat Islam karena hilangnya semangat penyelidikan ilmiah yang dituntut Al-Quran, Justru itu semaangat itu harus dikembangkan dalam kegiatan keilmuan dan majlis Ilmu perlu kembali digalakkan Para modernis itu memandang; (1) bahwa suburnya perkemba ngan sain dan semangat ilmiah abad IX–X dikalangan kaum Muslimin adalah buah dari usaha memenuhi tuntutan Alquran agar manusia mengkaji alam semesta hasil karya Tuhan yang telah diciptakan bagi manusia, (2) Pada abad pertengahan yang akhir semangat penyelidikan ilmiah telah merosot dan karenanya masyarakat Muslim lalu mandek dan merosot, (3) bahwa Barat telah menggalakkan keajaiban ilmiah yang sebahagian besarnya telah dipinjamnya dari kaum Muslimin dan karena itu mereka memperoleh kemakmuran bahkan menjajah negeri negeri Muslim sendiri, dan (4) Karena itu jika kaum Muslimin mempelajari kembali sain Barat yang telah berkembang akan berarti menemukan kembali perintah Alquran yang terabaikan,² dengan proposisi ini umumnya usaha untuk mengambil alih sebesar-besarnya seluruh pengetahuan dan teknologi Barat menjadi corak gerakan pembaharuan masa awal ini.

Tentunya hal ini mendapat tantangan dari berbagai kalangan ummat Islam terutama yang tradisional dan juga kalangan

¹ lihatFazlurRahman, *Islam and Modrenity, Transformation an Intellectual Tradition*, (Chicago: he University of Chicago, 1987), p. 136.

² FazlurRahman, *ibid*, p. 50-51.

fundamentalis. Kondisi ini memberi warna baru bagi gerakan pembaharuan berikutnya (modrenisme kontemporer).

Beberapa Pola Reaktualisasi Kebijakan Pembaharuan Pendidikan Islam

Secara umum upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam dari aspek budaya menjadi terpola kepada:

- a. Mengambil secara bulat semua ilmu sains dan pemikiran Barat dan mengenyampingkan Pendidikan Agama (adoptif).
- b. Membiarkan keduanya terpisah yang kemudian menciptakan dua pola pikir dalam satu individu, (Dualistik).
- c. Mencampur kedua unsur dengan proporsi lebih pada pendidikan sekular/umum namun masing-masing berjalan sendiri-sendiri. (adaptif).
- d. Mengintegrasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum.

Sementara itu dari kalangan tradisional tumbuh pula upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan agama dan memperbanyak tempatnya.

a. Pola Adoptif

Pola pertama bersifat adoptif terlihat di Turki pada masa Kemal Attaturk dan di Mesir oleh Muhammad Ali Pasha serta diikuti oleh Dinasti Pahlevi. Kemal Attaturk menutup semua lembaga Pendidikan Agama dan menggantikannya dengan pendidikan sekular model Barat, shalat dan azan diperintah dalam bahasa Turki. Sekularisasi ini dilakukan setelah Mustafa Kemal gagal untuk memasukkan pendidikan pada kurikulum tradisional setelah mengkampanyekannya, 1922-1928.

Para moderenis itu memandang (1) bahwa substansi perkembangan sains dan semangat ilmiah abad IX–X dikalangan kaum Muslimin adalah buah dari usaha memenuhi tuntutan al-Quran agar manusia mengkaji alam semesta hasil karya Tuhan yang telah diciptakan baginya, (2) Pada abad pertengahan yang akhir semangat penyelidikan ilmiah telah merosot dan karenanya

masyarakat Muslim lalu mandek dan merosot, (3) bahwa Barat telah menggalakkan keajaiban ilmiah yang sebahagian besarnya telah dipinjamnya dari kaum Muslimin dan karena itu mereka memperoleh kemakmuran bahkan menjajah negeri negeri Muslim sendiri, dan (4) Karena itu jika kaum Muslimin mempelajari kembali sains Barat yang telah berkembang akan berarti menemukan kembali perintah Alquran yang terabaikan,³

Ali Pasya di Mesir mulai dengan gerakan penterjemahan seluruh sains dan pemikiran Barat ke dalam bahasa Arab dan membuka sekolah-sekolah model Barat dengan mendatangkan guru dari Barat (Prancis) serta mengirim sejumlah siswa ke Barat. Usaha model adopsi ini tampaknya berjalan dengan pemaksaan. Hasilnya juga tidak memuaskan karena tidak sesuai dengan realitas sosial dan tidak bisa menerapkan unsur sains yang dipelajarinya ditambah adanya mayoritas yang tidak menerima hal ini menyebabkan tidak bertahan lama dan segera mengalami perubahan. Di Turki karena pertimbangan politik demokratis pada tahun 1946 pemerintah Turki memutuskan untuk membuka Pendidikan Khusus tenaga keagamaan dan kemudian tahun 1950 dibuka pula Fakultas Teologia.

Tampak Turki bergerak menjadi pola kedua. Sementara itu di Mesir atas kritik Muhammad Abduh ilmu agama dimasukkan di sekolah-sekolah sekuler dan Ilmu umum direkomendasikan masuk ke Al-Azhar tampak Mesir beralih ke pola ketiga. Kritik Abduh terhadap model adopsi Ali Pasya dikutip Fazlur dari Muhammad Abduh, *Al-Amal al-Kamilah*, sebagai berikut :

“Keahlian yang diprioritaskan menjadi tidak berarti karena tidak diberikan pendidikan nilai... kondisi moral mereka lebih buruk dari orang-orang yang buta huruf yang masih bersifat alamiah, mereka mengalami frustrasi mendapati dirinya tidak bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan ayah dan keluarganya. Dengan demikian ia menggunakan umurnya dengan sepenuhnya mengganggu atau hampir setingkat dengan itu.⁴ Sedangkan di Iran akhirnya berubah setelah adanya revolusi Islam.

³ Fazlur Rahman, *ibid*

⁴ Fazlur Rahman, *ibid*, p. 70.

Di Indonesia pola pertama ini secara terbatas pernah pula diperkenalkan Abdullah Ahmad di Padang dengan Adabiyah Schoolnya namun pada dasarnya pelajaran agama tetap tidak dihilangkan walau muatannya kecil.

b. Pola Dualisme

Secara umum pola kedua juga berlangsung di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sebagaimana juga di India dibawah penjajahan Inggris. Pola ini menghasilkan generasi yang berpola pikir terpisah sehingga tumbuh golongan yang berbudaya ke Barat-baratan yang bersikap apriori terhadap generasi yang berbudaya Islam tradisional demikian pula sebaliknya. Tampaknya kecenderungan ini didorong kesadaran anti penjajahan dan anti Barat, namun dipihak lain secara terselubung sebagai bahagian dari politik pendidikan bangsa penjajah terhadap bangsa jajahannya. Karena mereka ingin mempertahankan status quo yang dengan itu mereka melakukan pelemahan secara sistematis dengan mengkebiri dan melakukan peraturan perundangan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berseberangan dengan yang resmi atau diakui secara formal. Sebagai mana dilakukan Belanda di Indonesia dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar. Serta kebijakan lainnya yang menyebut sekolah yang diselenggarakan secara terpisah itu menghasilkan kelompok ekstrimis dan radikal, Dengan dalih itu kemudian satu persatu tokoh pendidikan Islam di tangkap dan sekolahnya di tutup.

c. Pola Adaptif

Setelah kemerdekaan bangsa-bangsa Muslim, semua golongan yang ada, akhirnya memilih pola ketiga sebagai upaya pemberdayaan dalam bentuk adaptasi dalam taraf asimilasi dan dalam taraf akomodasi Pola adaptif yang assimilatif seperti yang berlangsung di Madrasah dan pesantren yang bersifat akomodatif seperti yang berlangsung di sekolah.⁵

⁵ Lihat Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*, (Jakarta: Al-Husna, 1984), p. 68.

Pemikiran yang mendasari pembaharuan pola ketiga ini tampak sangat kuat pada gagasan Abduh yang dicoba terapkan di Mesir. Abduh memelopori memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulum Azhar. Kemudian gagasan ini dikembangkan pula oleh Sayid Ahmad Syahid dengan mendirikan Madrasah Doeband yang kemudian menjadi Dar al-Ulum Doeband, selanjutnya Sayyid Ahmad Khan di India mendirikan MOAC (Muhamma dan Anglo Oriented College) di Alighar. Kemudian di Indonesia gagasan pola ketiga ini dipopulerkan oleh Muhamadiyah (1912) diterima secara umum sekitar tahun 1916.

Gerakan pembaharuan pola ini juga melakukan upaya usaha penyegaran sistem budaya dengan memelopori gerakan kembali menyelidiki tentang Sunnatullah, mendorong penggunaan aqal. Seperti Muhammad Abduh menerbitkan majalah *Urwat al Wusqa* serta tafsir al-Manar, Sayyid Ahmad Khan juga memanfaatkan jaringan informasi dengan menerbitkan majalah *Tahzibul Akhlaq* dan mendirikan sekolah. Melalui penerbitan ini informasi untuk kontribusi budaya lebih mudah tersosialisasikan.

Pada periode berikutnya langkah ini diikuti oleh para pembaharu lainnya termasuk di Asia Tenggara seperti Al-Munir (1911) atas prakarsa H. Abdullah Ahmad, Al-Akhbar (1913), Al-Islam (1911) diterbitkan SI, Al-Imam (1908) diterbitkan Syekh Taher.⁶ Kegiatan media informasi ini sangat diutamakan oleh kalangan pembaharu untuk memberdayakan Pendidikan Islam, bahkan Persis menjadikan sebagai kegiatan utama organisasi dan walaupun organisasi ini relatif kecil tetapi mempunyai pengaruh yang luas disebabkan publikasi publikasi yang mereka keluarkan.⁷

d. Pola Integrasi

Pola ini berkembang paling terakhir sekitar tahun 1980-an dengan ide Islamisasi ilmu pengetahuan yang mulai marak setelah Konferensi Pendidikan Islam sedunia I di Mekah (1977)

⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), p. 47

⁷ *Ibid*, p. 37-38

kemudian II di Islamabad (1980) dan III Bangladesh (1981) selanjutnya IV di Jakarta (1987).

Dalam mengupayakan integrasi ini ditempuh berbagai cara diantara yang pertama dengan melakukan *kontektu aliasi, aktualisasi dan rekonstruksi dan sistematisasi*. Pembaharuan Pendidikan Islam tersebut dipengaruhi juga oleh berbagai faktor. Diantaranya dalam hal keperluan bidang ekonomi sampai tahap sebelum pase itu tidak tampak usaha yang jelas. Lebih banyak dalam bentuk tak langsung seperti dalam bentuk “magang sukarela” dan materi pengajaran fiqh tentang bab jual beli dan persewaan pertanian serta zakat. Pasca berkembangnya ide Islamisasi Ilmu Pengetahuan kesadaran yang bersifat langsung tentang itu mulai berkembang dengan mengupayakan mata pelajaran keterampilan pada tingkat pendidikan dasar menengah dan atas serta berkembangnya pusat pusat kajian ekonomi syariah yang selanjutnya berdiri fakultas dan sekolah tinggi Ekonomi bisnis dan perbankan Islam.

Sedangkan pembaharuan Pendidikan Islam di bidang agama dapat dibagi kepada dua pola. Pertama pola Purifikasi berorientasi pada pemurnian Islam dan pola kedua Modernisasi yang berorientasi perlunya membuka pintu ijtihad dan memahami Islam secara kontekstual pemikiran yang dikembangkan sebagai berikut :

Abduh menganjurkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menganjurkan pelaksanaan Ijtihad serta mengembangkan penalaran Muktazilah.⁸ Ahmad Khan seperti juga Abduh mengupayakan interpretasi Nash dan Sunnah secara kontekstual dan juga membangkitkan paham qadariah dalam pemahaman Agama. Gerakannya diterima oleh golongan terpelajar karena telah banyak dipengaruhi oleh konsep kebebasan manusia dalam ilmu pengetahuan modern lebih sesuai dengan paham qadariah daripada paham fatalisme dan

⁸ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), p. 158

lebih dapat menerima ide ide liberal modern dari pada ide ide tradisional lama.⁹

Pembaharuan Pendidikan di bidang politik secara nyata juga tidak jelas. Tetapi tampaknya dunia pendidikan Islam sangat dekat dengan politik. Hal ini mungkin disebabkan karena sebahagian besar negeri dan bangsa Islam terjajah. Sehingga kesadaran untuk menjadikan pendidikan wahana membangun kesadaran dan semangat memerdekakan bangsa sangat kuat. Dilihat dari segi ini ada tiga pola umum yang berkembang : *Pola pertama konfrontatif*, memusuhi semua yang berbau Barat dan mengembangkan semangat Jihad jika perlu dengan senjata. *Pola kedua transformatif*, mengupayakan merebut seluruh keunggulan Barat terutama Iptek dan sistem ketatanegaraan dan lembaga keilmuannya. Selanjutnya *pola kompromis* berusaha membuka kerjasama disemua lapangan. Seperti negara negara comenwealth yang Islam dan negara Timur Tengah walau tidak semua.

Dalam konsep integrasi ini setidaknya ada tiga pemikiran besar yaitu pemikiran yang dikembang Ismail Raji Al Faruqi dengan Syed Husain Nashr dengan ide Islamisasi Ilmu Pengatahuan , Faruqi menrekomendasikan *five work plan* untuk proses integrasi yaitu , (1) Menguasai semua disiplin keilmuan modern (2) menguasai semua khazanah keilmuan Islam (3) membina relevansi khusus Islam terhadap masing masing wilayah keilmuan modern (4) mencari jalan bagi sintesa kreatif antara khazanah warisan Islam dengan pengetahuan modern (5) meluncurkan pemikiran Islam tentang arah baru pengembangan dan pematapan panduan Ilahi.

Kedua pemikiran Fazlur Rahman yang menyatakan proses integrasi akan berlangsung dalam kerangka *constuct of paradigma*. Ketika seorang pakar muslim yang menguasai dengan utuh ilmu keislaman serta sumber utamanya maka ilmu pengetahuan modern akan dicerna dan direproduksi dalam pemahaman keilmuan yang terbaru atau terIslamkan.

⁹ Harun Nasution, *op-cit*, p. 171

Ketiga pemikiran yang datang dari para pakar pendidikan Islam yang mengkaji proses integrasi dari aspek teori kurikulum bahwa integrasi keilmuan Islam dan keilmuan modern dapat terjadi dengan mendisain kurikulum atau materi ajar dan mengembangkan orientasi kurikulum menjadi *open subject integrated curriculum*. Noeng Muhajir misalnya menawarkan proses transendental keilmuan yaitu keilmuan modern dikonsultasikan kepada wahyu dan keilmuan Islam dikonsultasikan kepada keilmuan modern. Selain itu dalam proses integrasi ditawarkan juga untuk melakukan istiqra nilai universal ajaran Islam dan selanjutnya diimplisitkan pada kajian keilmuan sains atau transinternalisasi nilai dan transeksTERNALISASI nilai Islami dalam ilmu pengetahuan. Kuntowijoyo menyebut sebagai proses objektivikasi nilai Islam.

e. Kebijakan Reaktualisasi Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia

Pembaharuan Pendidikan Islam mulai berlangsung pada awal abad XX ketika kesadaran akan keterbelakangan dari bangsa penjajah makin kuat. Untuk mengetahui pembaharuan yang dilangsungkan guna pemberdayaan itu akan dilihat secara historis sistematis.

Kebijakan Pembaharuan pendidikan mulai dari upaya kebijakan memperbaharui kurikulum dan model lembaga pendidikan yang dilakukan Abdullah Ahmad di Padang Sumatera Barat tahun 1904. Beliau mendirikan Adabiyah School, yang memberikan pengetahuan umum dengan sedikit pelajaran agama. Usaha ini mendapat tantangan terlebih lagi setelah kepala sekolahnya diangkat seorang berkebangsaan Belanda.

Selanjutnya beberapa tokoh mulai memperkenalkan model klasik di Maktab dan memasukkan tambahan pelajaran umum. Bentuk ini kemudian disebut dengan Madrasah dengan pelajaran umum tetapi pelajaran agama lebih banyak. Madrasah baru berkembang dan diterima masyarakat sekitar tahun 1916. Karena menunjukkan lebih menonjol ciri keagamaannya tetapi

juga refleksi kesadaran untuk mengejar ketinggalan dan upaya membebaskan diri dari kaum penjajah (Belanda). Dengan motif yang sama sebelumnya 1913 Al Irsyad mendirikan Madrasah¹⁰.

Setahun lebih awal Desember 1912 di Sumatera Utara berdiri Madrasah Maslurah.¹⁴Selanjutnya berdiri madrasah lainnya seperti Sumatera Tawalib (1918)Madrasah Tawalib dipimpin Haji Rasul memiliki cabang di beberapa daerah termasuk Surau Parabek. Pada 21 Januari 1928 mengadakan pertemuan cabang dalam pertemuan itu direncanakan mendirikan Pendidikan guru. Dalam pertemuan itu hadir tokoh cendekiawan dan ulama seperti Syech Muhammad Jamil Jambek, Syech Ibrahim Musa, Haji Jalaluddin Thaib, Haji Abdul Syakur, Abdul Aziz Sutan dan Dr. Ahmad Shaleh, Ide ini kemudian direalisasikan oleh Rahmah tahun 1935. Tahun 1937 berdiri Madrasah Pendidikan Guru oleh RahmahMadrasah untuk guru pria Al Kulliyah al-Muallimin al-Islamiyah dan untuk wanita Al-Kulliyah al-Muslimat al-Islamiyah. Zainuddin Labai tahun 1915 mendirikan Diniyah School dan 1 November 1923 ia mendirikan Madrasah Diniyah Puteri.Dengan penjenjangan (1) Awaliyah (3 thn); Ibtidaiyah (4 thn); Tazhiziyah (2 thn); Muallimin (4 thn); Tahassus (2 thn).

Bentuk adaptif (pola ketiga ini) lebih meluas dengan munculnya Muhammadiyah (1912) sebagai organisasi yang sepenuhnya bergerak dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Kehadiran Muhammadiyah dapat disebut babak baru dalam implementasi pemberdayaan Pendidikan Islam ditandai dengan beralihnya peranan individual dan hubungan personal dan kekeluargaan kepada hubungan pengurus dengan anggota. Tampaknya kehadiran organisasi bukan saja gejala baru tetapi sebagai akomodasi aspirasi yang tak terwakili pada pemerintah penjajahan. Gejala yang sama terlihat di India dengan berdirinya MOAC dan Nahdathul Wathan. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah mulai tingkat TK

¹⁰Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979), p. 309.

sampai ke Universitas dan membuka pula berbagai jenis sekolah kejuruan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang didirikan di berbagai tempat diseluruh Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya juga mendirikan lembaga pendidikan Agama model pesantren untuk kaderisasi ulama. Secara kuantitatif telah memberikan pemberdayaan yang besar bagi Pendidikan Islam di Indonesia. Muhammadiyah juga menentang Tarekat yang dianggap berlebih-lebihan.

Selanjutnya setelah kelahiran Muhammadiyah berdiri pula organisasi lainnya seperti NU (1926), Persis (1915), Al-Washliyah (1928), Al-Ittihadiyah (1930), Perti, Persyarikatan Ulama (PUI) (1911), Al-Irsyad, dan lagi organisasi sosial pendidikan keagamaan lainnya serta berbagai yayasan Pendidikan baik yang berapliasi pada organisasi ataupun yang berdiri sendiri.

Umumnya organisasi dan yayasan itu mengembangkannya Madrasah dengan ditambah pelajaran umum sedangkan Muhammadiyah mengembangkan Sekolah di tambah pendidikan agama Islam. Upaya memasukkan pelajaran umum pada pendidikan agama ini telah mulai dilakukan di Sumatera Barat pada awal abad XX oleh Abdullah Ahmad yang mendirikan Adabiyah School (1907). Ide ini menurut Stenbrink mencontoh Taher Jalaluddin di Singapura dan sekolah Gubernemen yang dilihatnya di Padang,¹⁷ Yang agak berbeda adalah NU (yang tradisional) pada awalnya mengembangkan Pesantren kemudian memasukkan Madrasah dalam sistem Pesantren (1919) dan kemudian memberikan juga Pelajaran umum didalamnya perubahan itu terjadi secara gradual dimulai tahun 1939 dan baru merata setelah pasca kemerdekaan.¹¹ Selanjutnya NU juga kemudian mendirikan sekolah dan Perguruan Tinggi didalam kompleks Pesantren.

Pasca kemerdekaan organisasi dan yayasan itu terus melanjutkan aktivitasnya beberapa diantaranya beralih menjadi partai politik seperti NU, sedang Muhammadiyah

¹¹ K.A. Steenbrink, *op-cit*, p. 72

tetap konsisten dengan gerakannya semula sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan pendidikan. NU kemudian menyadari kekeliruannya mengambil langkah sebagai partai politik kemudian menyatakan kembali ke Khittahnya. Namun kemudian tokoh tokohnya mendirikan Partai Politik untuk mengeyerapkan aspirasi politik kaum santri dengan mendirikan PKB. Sementara itu tokoh Muhammadiyah juga mendirikan partai untuk memperjuangkan kepentingan umat secara kosntitusional dengan mendirikan PAN. Meskipun tidak semua tokoh organisasi ini terjun ke dunia politik namun kiprah beberapa tokoh sentral organisasi yang dominan menyebabkan terjadi juga politisasi pendidikan dan kurangnya perhatian dalam pembinaan agama dan keagamaan ummat , upaya pemberdayaan dan memperkuat keberdayaan pendidikan Islam kurang mendapat perhatian.

Selanjutnya upaya pembinaan Pendidikan Islam lebih dominan diselenggarakan dibawah koordinasi Departemen Agama. Berbagai kebijakan untuk pemberdayaan Pendidikan Islam diarahkan dan diseragamkan. Terutama dalam sistem penjenjangan dan kurikulum serta civil effect ijazah yang dipersamakan dengan ijazah sekolah-sekolah di lingkungan Depdikbud. Departemen Agama juga melakukan pembinaan kelembagaan Pendidikan Islam mulai dari membuka Madrasah Diniyah yang ditujukan untuk memenuhi kekurangan jam pelajaran agama di sekolah umum dan Madrasah tingkat dasar (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), menengah (Madrasah Tsanawiyah Negeri), atas (Madrasah Aliyah Negeri) dan IAIN. Selanjutnya seluruh lembaga pendidikan Islam yang ada diarahkan untuk mengikuti pola yang dibakukan itu. Sementara untuk Pengajaran Agama di sekolah umum dilakukan kesepakatan bersama dengan Departemen Pendidikan.¹² Departemen Agama mengangkat guru agama negeri untuk sekolah dan Madrasah Negeri. Guru Agama Negeri ini juga

¹² SKB Menteri PPK dan Menteri Agama RI, tanggal 16 Juni 1951. Lihat Zakiah Daradjat, *MP3A Dalam Prespektif Sejarah*, (Jakarta: Work Paper Seminar Peran MP3A Dalam Pendidikan Nasional, 1998), p. 6

diperbantukan ke sekolah dan Madrasah Swasta. Beberapa dari organisasi/ yayasan menolak dan mengangkat sendiri guru sesuai kriteria yang ditetapkan mereka. Rekrutmen tenaga guru agama negeri ini dari PGA (Pendidikan Guru Agama dan IAIN, PTAIS serta PTN dan PTS).

Departemen Agama juga mendorong beberapa perbaikan seperti mengeluarkan SKB Menteri Agama dan Pendidikan untuk memberikan pelajaran agama di sekolah sekolah mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi dan membentuk MP3A (Majlis Pertimbangan Pendidikan & Pengajaran Agama pada 25 September 1951).¹⁸Pada tahun 1975 dikeluarkan SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) untuk memberikan status yang sama kepada Madrasah dan sekolah dalam civil effect dan juga penjenjangan dengan demikian seorang siswa Madrasah dapat saja berpindah ke sekolah demikian juga sebaliknya.

Dengan SKB 3 Menteri ini muatan Madrasah sama dengan sekolah dalam pelajaran ilmu pengetahuan umum. Bidang study agama di sekolah umum diberikan hanya dua jam pelajaran tiap minggu. Sedangkan di Madrasah disamping bidang study ilmu umum diberikan pula disiplin ilmu agama sehingga bidang study menjadi sangat banyak sedangkan target kurikulum untuk bidang study umum harus sama dengan capaian sekolah. Pihak Departemen juga mendorong agar Madrasah Diniyah yang khusus memberikan pelajaran agama terus berkembang. Untuk diniyah ini diberikan bantuan penyelenggaraan dan disusun pula pedoman garis besar pengajarannya dan jenjangnya serta lama belajarnya. Meski terus berjalan namun perhatian terhadap Diniyah agak menurun bahkan sejak akhir 80-an perhatian lebih pada TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) untuk pemberantasan buta aksara Al-Quran.

Menyadari adanya kesenjangan dalam Pendidikan Agama terutama kelangkaan Ulama Depag telah membuka program Madrasah Aliyah Khusus (MAPK) sebagai usaha mengintensifkan MAN jurusan Agama yang kurang diminati. Pihak swasta juga mengupayakan penambahan pengajaran agama dengan

menambah waktu belajar pada sore hari terutama di sekolah umum. Sedang untuk Madrasah beberapa yayasan mengikutkan peserta didik pada sekolah yang mereka kelola terutama bidang study esakta atau membuka pelajaran tambahan. Dewasa ini dikembangkan pula sekolah berasrama (boarding system).

Sedangkan bidang study agama di perguruan tinggi menurut Syalabi diberikan satu semester. PTS yang dikelola oleh yayasan dan organisasi Islam menambahkan diberi setiap semester. Untuk ada kesamaan dalam penterjemahan Al-Quran, departemen agama mengeluarkan pula terjemahan dan tafsir Al-Quran standar, dan buku buku paket pelajaran agama Islam sesuai dengan kurikulum yang dibakukan. Untuk buku acuan atas inisiatif Depdikbud bekerjasama dengan Depag telah dibentuk team penyusunan materi bidang study Agama menurut disiplin Ilmu (Islam dalam Disiplin Ilmu). Selanjutnya sebagai acuan dalam penterjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia Departemen Agama telah pula menetapkan team pentashihan cetakan al-Quran dan tafsir serta terjemahnya. Dalam penyusunan Tafsir ini beberapa ulama Indonesia telah pula menyusun tafsir Al-Quran.

Pengajian di Mesjid dan Majelis Ta'lim terus berlangsung dan menunjukkan kesemarakannya bahkan diselenggarakan oleh segenap lapisan baik di desa, kota maupun di Instansi pemerintah dan swasta. Demikian juga kegiatan Tabligh. Kegiatan ini dikelola masyarakat bersama ulama dan juga oleh organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan-yayasan. Penerbitan, majalah, jurnal, buku buku agama baik terjemahan maupun tentang pemikiran agama, masalah sosial, ekonomi, kependidikan, Ilmu pengetahuan teknologi, filsafat. Beberapa majalah memuat pula soal jawab masalah agama.

Di antara majalah/ jurnal itu ada sanggup bertahan dalam waktu yang panjang dan memiliki oplah yang besar.²¹Era 70-an keatas banyak pula berdiri pusat study keagamaan mirip majlis ilmu pada masa kemajuan Islam klasik (diantaranya seperti LSAF, Paramadina, An-Nida, LKIS, Limited Group) dan juga

Lembaga swadaya masyarakat yang diorganisir oleh aktivis. Juga berbagai kelompok seni budaya dan sanggar sanggar mode Islam. Pertumbuhan lembaga – lembaga baru ini makin semarak dan beragam corak serta peran.

Secara de facto upaya integrasi Pendidikan Islam pada pendidikan Nasional telah diupayakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Persoalan besar yang dihadapi dalam agenda reformasi untuk mengembangkan pola integrasi secara total adalah adanya dichotomi institusional pendidikan dalam sistem pendidikan Nasional serta meretas dichotomi keilmuan. Kedua tantangan itu diperkirakan akan terjawab dengan langkah mewujudkan pendidikan Islam terintegrasi dalam sistem nasional. Karena sebagai suatu sistem upaya integrasi tersebut dapat berlangsung dari aspek kontekstualisasi, interkoneksi, institusionalisasi serta legeslasi.

Aktivitas integrasi dalam bentuk kontekstualisasi berlangsung dalam berbagai kegiatan seminar dan kajian kajian serta publikasi. Para ilmuwan Muslim melakukan studi tematik dalam berbagai aspek pengetahuan dan teknologi. Bentuk pengajaran Islam di Perguruan tinggi juga berkembang dalam bentuk IDI (Islam dalam Disiplin Ilmu) hal ini diperkuat dengan adanya keputusan Konferensi Islam sedunia di Islamabad untuk menerbitkan buku dasar IDI tersebut.

Kajian interkoneksi atau trans disiplin juga menjadi fokus pengembangan kajian ilmu Islam seperti kajian Psikoterapi, Ekonomi Perbankan, Antropologi, Planologi, Gizi dan Halal Food, Ekonomi Pendidikan dan Pendidikan Ekonomi, Pendidikan SainTek Islami. Dalam perkembangan selanjutnya tumbuh menjadikan kajian yang intens yang memerlukan wadah atau pusat kajian dan institusi kajian dalam bentuk fakultas. Persoalan mendasar adalah institusi tersebut dapat berdiri tetapi tidak memiliki legalitas formal. Keberadaan Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional yang dikelola Kementerian Agama tampaknya tidak memadai untuk menampung cita cita besar itu. Sebagai tindak lanjut dari SK3 Menteri di upayakan tersusunnya Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pada

UUSPN Nomor 2 Tahun 1978. Pada UUSPN NO 2 Tahun 1978 kedudukan Pendidikan Islam telah termasuk sebagai sub sistem pendidikan Nasional.

Serentak dengan reformasi yang terjadi maka upaya untuk mewujudkan Pendidikan Islam sebagai bahagian sistem pendidikan Nasional menjadi dominan sebagai solusi utama persoalan krisis nasional. Legeslasi sebagai payung hukum upaya integrasi diupayakan melalui UUSPN (Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Pada undang undang ini pendidikan ini telah setara dan sama kedudukannya dalam sistem pendidikan Nasional. Pada UUSPN No 20 tahun 2003 ini pendidikan Agama di klasifikasikan kepada Pendidikan Agama setara dengan Pendidikan Nasional dan Keagamaan setara dengan pendidikan khusus lainnya. Persoalan hambatan instusional dengan sendirinya telah hilang tinggal lagi bagaimana mengorganisir institusi pendidikan Tinggi menjadi dapat menampung berbagai perkembangan kontekstualisasi dan interkoneksi keilmuan Islam. Para pakar memandang IAIN (Institut Agama Islam Negeri) harus segera menjadi UIN (universitas Islam Negeri) sehingga berbagai pertumbuhan tersebut dapat disalurkan dan dihidup kembangkan untuk sumbangan sebesar besarnya kepada peradaban.

Meskipun dari segi legeslasi Pendidikan Islam di Indonesia telah memiliki payung hukum namun persoalan dikhotomi masih belum selesai. Persoalan terbesar adalah pada paradigma ilmu. Masih terbentuk paradigma terpisahnya ilmu agama dan ilmu sains yang oleh Fazlur Rahman dipandang sebagai awal krisis epistemologis Muslim. Padahal sesungguhnya kedua rumpun ilmu itu berawal dari hidayah Allah dan hasil penalaran manusia. Jalan integrasi akan terbuka lebar bila paradigma itu dapat dirubah menjadi kesatuan Ilmu. Integrasi yang utama adalah Ilmu pengetahuan berbasis kewahyuan dengan ilmu pengetahuan yang berbasis pengalaman dan pemikiran (*revealed knowledge* dengan *acquired knowledge*)

Pada level ini integrasi telah berlangsung reaktualisasi paradigma keilmuan yang dilakukan dalam empat bentuk atau pola ;

Pertama kajian tentang ilmu yang berbasis agama dilakukan dengan melengkapi dengan pendekatan sains. Integrasi pola pertama ini disebut juga dengan upaya kontekstualisasi ajaran agama sehingga terjadi kajian tauhid sosial, fiqh sosial, akhlak sosial. Demikian juga dalam bidang ekonomi, budaya dan politik.

Kedua kajian tentang ajaran agama dibahas dengan pendekatan kajian sains. Pada pola kedua kecenderungan integrasi berlangsung dalam bentuk Islam dalam disiplin ilmu. Sesuai dengan perkembangan pembidangan ilmu maka kajian berkembang menjadi kajian atau disiplin Ilmu Islam dalam ilmu kealaman, Islam dalam Ilmu Sosial dan Islam dalam Ilmu Humaniora.

Ketiga kajian konseptual keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada pola ketiga ini integrasi dilangsungkan dalam interkoneksi sebagai suatu sistem konsep mapping yang dikembangkan dalam bentuk kajian tematik Al-Qur'an dan Hadis Rasul.

Keempat kajian sains dilengkapi dengan landasan kajian kewahyuan, Pada pola Keempat mengembangkan kajian komprehensif semua disiplin ilmu pengetahuan dengan memberi landasan kewahyuan yang akurat dan shahih.

Berdasarkan kajian dan implementasi Pendidikan Islam keempat pola yang berkembang ini dapat diaktualisasikan tuntas bila prosesnya dilakukan sesuai dengan pandangan pakar pendidikan Islam yang dikemukakan terdahulu

Penutup.

Reaktualisasi kebijakan pemberdayaan pendidikan Islam dalam rentang sejarah terus berlangsung dan menemukan momentumnya untuk perubahan. Perubahan yang signifikan tampak pada makin kuatnya keinginan untuk berlakunya integrasi keilmuan menjadi satu kesatuan keilmuan modern. Keilmuan modern yang secara tuntas dan terpadu berbasis pemahaman dan pemikiran ajaran Islam.

Semaraknya kajian tentang keimuan Islam dan Keilmuan modern yang berbasis kajian Islam dalam wujud pengimplisitasian berbagai nilai universalitas Islam telah mengembangkan pandangan baru pada perkembangan keilmuan modern serta mendorong tumbuhnya intitusi pusat pengkajian keimuan baru baik dalam bentuk pusat studi maupun program studi dan fakultas diberbagai universitas termasuk Universitas Islam Negeri Legeslasi berupa undang undang dapat pendidikan dan undang perguruan tinggi keagamaan Islam dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk mengembangkan proses integrasi keilmuan sebagai upaya reaktualisasi kebijakan pemberdayaan pendidikan Islam pada semua jenis. Jalur dan jenjang pendidikan.

Perkembangan instutusi ini tentu harus diikuti dengan pemantapan reaktualisasi proses pembelajaran tidak sekedar reaktulisasi paradigma yang dikemukakan dalam empat pola : *Pertama* kajian tentang ilmu yang berbasis agama dilakukan dengan melengkapi dengan pendekatan sains. *Kedua* kajian tentang ajaran agama dibahas dengan pendekatan kajian sains. Pada pola kedua kecenderungan integrasi berlangsung dalam bentuk Islam dalam disiplin ilmu. *Ketiga* kajian konseptual keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan. Keempat kajian sains dilengkapi dengan landasan kajian kewahyuan, tetapi sampai pada tataran implementasi epestimologis yang didukung pendekatan yang ditawarkan para pakar pendidikan Islam bahwa integrasi keilmuan Islam dan keilmuan modern dapat terjadi dengan beberapa strategi yaitu:

- 1) Mendisain kurikulum atau materi ajar dan mengembangkan orientasi kurikulum menjadi *open subject integrated curriculum*.
- 2) Proses transendental keilmuan yaitu keilmuan modern dikonsultasikan kepada wahyu dan keilmuan islam dikonsultasikan kepada keilmuan modern.
- 3) Selain itu dalam proses integrasi ditawar juga untuk melakukan istiqra nilai universal ajaran Islam dan selanjutnya diimplisitkan pada kajian keilmuan sains atau transinternalisasi nilai dan transeksTERNALISASI nilai Islami dalam ilmu pengetahuan. sebagai proses objektivikasi nilai Islam.

Mudah- mudahan dapat direalisasikan secara optimal oleh berbagai intitusi pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi Islam

Daftar Pustaka

- Al-Attas,S.M.N , 1999, *The Concept Of Education In Islamic, A Framework for Islamic Philosophy Of Education* . Kuala Lumpur : Institute Of Islamic Thought And Civilization.
- Al Abrasyi , Muhammad Athiyah, 1974 , *Al-Tarbiyah al-Islamiyah*, Kairo; Dar al -Qaumiyyah li al-Thiba ah wa al- Nasyr.
- Al-Attas,S.M.N dan Syed Sajjad Husain , 1979, *Aims and Objective Islamic Education*, Londo
- Ahmad Saad Mursi, 1971, *Tarikh Al-Tarbiyah Wa al-Ta'lim*, Mesir ; Alam al Kutub
- Deliar Noer,1982, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, Jakarta: LP3ES,
- FazlurRahman, 1987, *Islam and Modrenity, Transformation an Intellectual Tradition*, Chicago: he University of Chicago,
- Harun Nasution,1995, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Pemikiran*, Bandung:Mizan,
- Ismail Raji Al Faruqi , 1990, *Islamization Of Knowlwdge ; General Principle and Work Plan*, Washington DC ., International Institute of Islamic Thought.
- Kuntowijoyo, Agama Negara dan Format Sosial, 1993, *Sejarah Aleneasi dan Oposisi Islam di Indonesia* “ Dalam AE Priyno (ed) *Paradigma Islam , Interpretasi untuk Aksi*, Bandung ; Mizan
- Langgulong,1984, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*, Jakarta: Al-Husna,.
- Mehdi Nakosteen,1984, *History Of Islamic Origin of Western Education A.D 800-1350 with introduction to Medival Muslim Education*, Colorado ;University Of Colorado Press, Boulder.

SKB Menteri PPK dan Menteri Agama RI, tanggal 16 Juni 1951.

Zakiah Daradjat, 1988, *MP3A Dalam Prespektif Sejarah*, Jakarta:
Work Paper Seminar Peran MP3A Dalam Pendidikan
Nasional,